

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, dunia seakan tidak lagi memiliki batas ruang dan waktu sehingga banyak hal yang ikut terpengaruh akibat dari adanya perubahan tersebut. Dunia yang seakan tidak memiliki batas ruang dan waktu kemudian mulai memunculkan berbagai tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap individu maupun organisasi (misalnya gaya hidup, perekonomian, perindustrian, perdagangan, dan lain-lain). Salah satu tuntutan yang muncul terutama bagi organisasi adalah agar organisasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya sehingga pertanggungjawaban perusahaan kepada publik dan para pemegang saham semakin transparan dan laporan keuangan tersebut diharapkan dapat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Selain itu, setiap organisasi terutama organisasi yang terbuka untuk publik dan sahamnya terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia juga diwajibkan untuk melakukan audit atas laporan keuangannya. Audit laporan keuangan yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban perusahaan kepada publik dan para pemegang sahamnya, hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang profesional dalam bidang audit dan biasanya profesional tersebut disebut sebagai akuntan publik atau auditor eksternal. Dan sudah merupakan suatu kewajiban bagi seorang auditor untuk memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan kemudian menyatakan pendapat (opini) atas kewajaran laporan keuangan tersebut.

Tugas auditor sebagai pemeriksa laporan keuangan menyebabkan seorang auditor tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan bantuan auditor lainnya agar pekerjaannya lebih efektif dan efisien. Hal ini biasanya disebabkan oleh besarnya ukuran perusahaan (perusahaan mungkin mempunyai berbagai anak perusahaan, mempunyai beberapa cabang perusahaan di berbagai daerah atau mempunyai pabrik dan gudang di beberapa daerah) dan banyaknya transaksi perusahaan yang terjadi selama satu periode akuntansi. Oleh sebab itu, auditor-auditor tersebut harus bekerja sama dan bergabung di dalam suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) tertentu sehingga pekerjaannya akan menjadi lebih mudah karena masing-masing auditor akan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda ketika melakukan audit atas sebuah perusahaan. Akan tetapi, sebelum memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan dan memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan tersebut, auditor perlu untuk melakukan prosedur-prosedur penerimaan penugasan audit. Penerimaan penugasan audit yang dimaksud dalam hal ini adalah penerimaan perikatan audit oleh auditor (dalam jabatannya sebagai Partner) untuk melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan (dalam hal ini disebut sebagai klien).

Seorang partner membutuhkan berbagai pertimbangan dalam menerima suatu perikatan audit karena terdapat banyak risiko di dalam mengaudit dan mengeluarkan opini atas suatu laporan keuangan. Penerimaan perikatan audit adalah tahap awal dari audit laporan keuangan yang melibatkan suatu keputusan untuk menerima (atau menolak) kesempatan untuk menjadi auditor dari klien baru

atau untuk melanjutkan sebagai auditor bagi klien yang sudah ada. (Boynton, *et al*, 2002).

Petunjuk penerimaan perikatan audit dapat dilihat pada Standar Audit (SA) dan Sistem Pengendalian Mutu Nomor 1 (SPM1) dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Petunjuk tersebut pada dasarnya dibuat untuk mencegah terjadinya penerimaan perikatan audit yang menimbulkan ancaman berupa ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar profesionalisme dari seorang atau lebih auditor dalam mengaudit suatu perusahaan dan bertujuan juga untuk mengurangi ancaman lainnya yang mungkin timbul karena diterimanya perikatan audit atas suatu perusahaan.

Adanya prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dan ancaman-ancaman yang mungkin timbul dari suatu perikatan audit menyebabkan setiap KAP harus berhati-hati dalam memilih kliennya. Apabila KAP menerima suatu perikatan audit, maka KAP tersebut harus mampu menanggung segala risikonya. Oleh sebab itu, dibutuhkan kepatuhan terhadap SPAP yang telah diterbitkan dan diberlakukan di seluruh Indonesia agar setiap KAP dapat meminimalkan risiko yang dapat terjadi ketika mengaudit suatu klien.

Sebagai salah satu KAP yang cukup terkenal dan memiliki kurang lebih 645 klien, KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil juga melakukan tahapan penerimaan perikatan audit agar dapat meminimalkan risiko yang akan terjadi, baik bagi bisnis KAP maupun bagi bisnis kliennya. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui apakah penerimaan perikatan audit pada KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil sudah sesuai dengan SPAP.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikemukakan peneliti dalam penelitian ini adalah “Apakah penerimaan perikatan audit pada KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil, Jakarta telah sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)?”

1.3 Batasan Masalah

Beberapa batasan dalam penelitian ini adalah :

1. Jumlah klien KAP Handrawinata Eddy Siddharta & Tanzil yang banyak menyebabkan peneliti tidak dapat menelaah satu per satu klien KAP, oleh sebab itu penelitian ini hanya mengambil beberapa sample dari 3 kategori klien yang telah ada. Kriteria pemilihan dan pengambilan sample selanjutnya akan dijelaskan didalam metodologi penelitian dari skripsi ini.
2. Banyaknya jasa yang ditawarkan oleh KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil kepada perusahaan maupun kepada publik menyebabkan peneliti tidak dapat menelaah satu per satu penerimaan perikatan atas jasa-jasa tersebut sehingga peneliti hanya akan menelaah tentang penerimaan perikatan audit atas audit laporan keuangan.
3. Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) acuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPAP 2014. Oleh sebab itu, peneliti hanya akan menelaah penerimaan perikatan audit atas laporan keuangan yang berakhir pada tahun 2014 agar penelitian ini menjadi lebih baik dan menjadi penelitian yang sesuai dengan data terbaru.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerimaan perikatan audit pada KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil, Jakarta telah sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi KAP Handrawinata Eddy Siddharta & Tanzil dalam menerima perikatan audit selanjutnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Objek Penelitian

Hartono (2011) menyatakan bahwa objek penelitian merupakan suatu entitas yang akan diteliti. Oleh sebab itu, obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil yang berlokasi di Jakarta.

1.6.2 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yang akan menggunakan dua jenis data, yaitu :

1. Data primer yaitu data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil melakukan observasi dan wawancara langsung terhadap Rekan KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil; dan

2. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dengan melakukan inspeksi terhadap dokumen-dokumen penerimaan perikatan audit yang dimiliki oleh KAP dan buku-buku atau jurnal-jurnal yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah cara peneliti dalam memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini. Berikut merupakan penjelasan tentang teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti data yang didapatkan dari KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil dan mengamati prosedur penerimaan perikatan audit yang dilakukan oleh Rekan KAP terhadap klien/calon klien.
2. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan kepada Rekan KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil tentang penerimaan perikatan audit.
3. Inspeksi dilakukan dengan cara meneliti dokumen penerimaan perikatan yang dimiliki oleh KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil sebanyak dua belas (12) set dan kemudian meneliti keseuaian prosedurnya terhadap SPAP.

1.6.3 Data yang Dibutuhkan

Data-data yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Form analisis atas klien.
2. Form independensi yang harus diisi oleh auditor KAP.

3. Surat perikatan audit yang diberikan kepada klien oleh pimpinan KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil.

Keterangan :

Surat permohonan atau permintaan oleh klien kepada KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil untuk melakukan audit tidak ada karena pada dasarnya klien KAP merupakan kenalan Partner atau Pejabat KAP sehingga permintaan audit biasanya dilakukan secara lisan dan persetujuan untuk meminta dan melakukan audit langsung tertera di dalam surat perikatan.

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penilaian kecocokan antara praktik penerimaan perikatan audit oleh KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil terhadap prosedur penerimaan perikatan audit yang telah ditetapkan dalam SPAP. Penilaian kecocokan prosedur penerimaan perikatan audit tersebut dilakukan dengan cara membandingkan prosedur yang ditetapkan dalam SPAP dengan prosedur yang dilaksanakan oleh KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi kedalam lima bab yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini diuraikan tentang landasan teori yang berhubungan dengan kerangka pemikiran yang menjadi dasar pemikiran peneliti dalam melakukan analisis.

Bab III Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini berisi tentang gambaran umum Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil.

Bab IV Analisis Penerimaan Perikatan Audit

Bab ini berisi analisis kesesuaian penerimaan perikatan audit pada Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil, Jakarta dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2014.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.